



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2>

Received: 14 Juli 2024, Revised: 21 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations

Linawati Linawati¹, Syahril Djaddang²

¹Doktor Ilmu Ekonomi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, elin.linawati79@gmail.com

²Doktor Ilmu Ekonomi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia, syahril@univpancasila.ac.id

Corresponding Author: elin.linawati79@gmail.com¹

Abstrak: Tujuan dari paper ini adalah menyajikan rangkuman komprehensif tentang kepatuhan pajak berbasis *Model Slippery Slope*, yang menekankan hubungan antara kepercayaan, kekuasaan, dan kepatuhan pajak. Metode riset yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil artikel ini menunjukkan bahwa model *Slippery Slope* tetap relevan dan digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan kekuasaan memastikan adanya konsekuensi untuk ketidakpatuhan. Kekuasaan koersif efektif dalam jangka pendek, tetapi kekuasaan legitimasi dan pendekatan edukatif lebih efektif dalam jangka panjang. Implikasi praktik dapat membantu otoritas pajak membangun cooperative compliance dengan wajib pajak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran untuk menggali perilaku wajib pajak.

Kata Kunci: *Tax Compliance, Slippery Slope Framework, Taxpayer*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem perpajakan suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak akan memastikan penerimaan pajak yang optimal, yang kemudian mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik. Namun, mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak mudah, karena melibatkan berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran warga negara terhadap kewajiban pajak, efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan dari otoritas pajak, serta Namun, mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak mudah, karena melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan kebijakan yang kompleks.

Wajib pajak mungkin lebih termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela jika mereka yakin bahwa sistem perpajakan adil dan bahwa pajak digunakan secara efisien untuk kepentingan umum. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau dana pajak disalahgunakan, mungkin cenderung menghindari atau menggelapkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2014), mengeksplorasi pergeseran pendekatan dalam kepatuhan pajak dari model tradisional yang berbasis *deterrence*

ke model yang lebih kooperatif berbasis *deference*. Inti dari penelitian Kirchler menyimpulkan bahwa pergeseran *deterrence* ke *deference* memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi sistem perpajakan, termasuk peningkatan kepatuhan sukarela dan penguatan legitimasi otoritas pajak di mata publik.

Pendekatan ekonomi lebih ditekankan pada model *deterrence model* atau model tradisional, sementara pendekatan *deference* menekankan pada pendekatan *behavioral cooperation*, pendekatan ini penting untuk membangun kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak serta mengutamakan peningkatan pelayanan oleh otoritas pajak.

Deterrence model banyak diterapkan pada awal kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, terutama sekitar tahun 1960-1970an. Model ini pertama kali diajukan oleh Becker (1968) dan menjadi dasar bagi Allingham dan Sandmo (1972) yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak melalui ancaman sanksi dan pengawasan ketat. Pada masa tersebut, Wajib Pajak dipandang sebagai individu yang bertindak secara rasional secara ekonomi dan memiliki potensi untuk melanggar hukum perpajakan. Otoritas pajak menggunakan rasa takut sebagai alat untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan perpajakan. Namun, model ini dianggap tidak memadai dalam memahami masalah kepatuhan pajak secara menyeluruh. Model ini tidak mampu menjelaskan mengapa wajib pajak bersedia membayar pajak secara sukarela tanpa adanya penegakan hukum (*voluntary tax compliance*) (Torgler, 2003).

Kirchler et al (2008) kemudian menggabungkan perspektif ekonomi (*economic deterrence model*) dan psikologis (*psychology model*) dalam perilaku perpajakan untuk menjelaskan kepatuhan pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas tersebut adalah faktor utama yang menentukan kepatuhan pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008, 2014). *Economic Deterrence Model* menyoroti pentingnya aspek-aspek ekonomi dalam memotivasi kepatuhan pajak, seperti ancaman sanksi dan tarif pajak yang tinggi. Sementara itu, *Social Psychology Model* menekankan peran faktor-faktor non-ekonomi, seperti moralitas, norma sosial, dan persepsi keadilan, dalam membentuk perilaku perpajakan. Dengan menggabungkan kedua model tersebut, kepatuhan pajak kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non-ekonomi.

Teori Slippery Slope yang diperkenalkan oleh Kirchler et al (2008) menawarkan perspektif baru dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan pajak. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kekuasaan otoritas pajak (*power of the authorities*) dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas (*trust in the authorities*). Slippery Slope Theory memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika antara otoritas pajak dan wajib pajak. Kekuasaan otoritas pajak yang efektif dapat mengurangi peluang penghindaran pajak melalui penegakan hukum yang ketat. Di sisi lain, kepercayaan wajib pajak yang tinggi terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak secara sukarela. Kombinasi antara kekuasaan dan kepercayaan ini menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak.

Model Slippery Slope telah diuji secara empiris di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kepercayaan, keadilan, dan kekuatan otoritas pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian oleh Gobena dan Van Dijke (2016) menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi keadilan berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan sukarela. Kastlunger et al. (2013) juga menegaskan bahwa baik kekuatan otoritas pajak maupun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, Gangl et al. (2013) menemukan bahwa kombinasi antara pendekatan yang keras dan berbasis kepercayaan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kogler dkk. (2013) menemukan bahwa kombinasi

kepercayaan dan kekuasaan yang tinggi menghasilkan kepatuhan pajak tertinggi dan penghindaran pajak terendah. Kepercayaan yang tinggi mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan kekuasaan yang tinggi meningkatkan kepatuhan keseluruhan. Kirchler dkk. (2014) menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan penting, pengendalian melalui audit dan denda juga diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak. Olsen dkk. (2018) menambahkan bahwa kombinasi kepercayaan dan kekuasaan yang tinggi mengurangi perasaan negatif dan meningkatkan niat untuk patuh.

Meskipun Slippery Slope Theory telah menjadi fokus utama dalam penelitian kepatuhan pajak, masih ada keraguan dan perdebatan tentang konsistensi temuan dan hubungan antar variabel yang diselidiki. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan literatur yang sistematis untuk mengevaluasi korelasi antara berbagai faktor dalam model kepatuhan pajak berbasis Slippery Slope Theory.

Determinasi kepatuhan pajak melalui model Slippery Slope dapat menjadi dasar dalam membangun paradigma *Cooperative Compliance*. Teori Slippery Slope menggabungkan perspektif ekonomi dan psikologis dalam menganalisis kepatuhan pajak, dengan dua dimensi utama yaitu kekuatan (*power*) dan kepercayaan (*trust*). *Cooperative Compliance* menekankan kolaborasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, dengan tujuan membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan transparansi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan hukum dan sanksi tidak selalu efektif dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan yang menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pembangunan kepercayaan cenderung memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Contohnya, penelitian oleh Alm et al. (2019) dan Kogler et al. (2016) menunjukkan bahwa kepercayaan dan kerja sama antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara signifikan.

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait model kepatuhan pajak berbasis Slippery Slope Theory. Fokus dari kajian ini adalah untuk memahami korelasi antara elemen-elemen dalam teori ini dengan tingkat kepatuhan pajak yang dihasilkan. Dalam Slippery Slope Framework (SSF), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua elemen utama yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak yang mendorong kepatuhan sukarela dan kekuasaan otoritas pajak yang mendorong kepatuhan yang dipaksakan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai efektivitas Slippery Slope Theory dalam konteks kepatuhan pajak. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk rekonstruksi Slippery Slope Theory dengan mempertimbangkan variabel lain yang mungkin berpengaruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR) Of Correlations* untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan beberapa penelitian yang relevan terkait model kepatuhan pajak berbasis Slippery Slope dalam publikasi riset perpajakan, baik di Indonesia maupun dalam jurnal internasional. Pendekatan SLR dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti, serta memastikan keakuratan dan keandalan hasil.

Data akan dikumpulkan dari sumber literatur yang memenuhi kriteria inklusi. Informasi yang akan diekstraksi meliputi judul artikel, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, variabel yang diamati, temuan utama, dan korelasi antara variabel-variabel tersebut. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi Slippery Slope Framework, *Tax Compliance*, *Trust in Tax*, *Power of Tax*, *Tax Compliance Models*, *Tax Compliance Behavior*. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dari tahun 2014 sampai dengan 2024.

Data yang diekstraksi dianalisis secara deskriptif dan tematik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum dari studi yang disertakan dalam tinjauan. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari literatur, termasuk korelasi antara variabel kepercayaan, kekuasaan, dan kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Beberapa penelitian yang direview menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak sebagai elemen kunci dalam model Slippery Slope. Sebanyak 23 jurnal direview dari tahun 2014 hingga 2024, termasuk penelitian dari berbagai penulis seperti Benny & Rodoni (2021), Dahrani et al. (2021), Mariganto et al. (2023), Ratmo (2014), Elly (2015), Fábio Pereira da Silva et al. (2019), Amalia (2021), Gunawan & Mispa (2022), Haq & Misra (2023), Darmayasa dan Hardika (2021), Darmayasa, dkk (2024), Fajriana dkk. (2020), Pangesti dkk (2023), Khurana & Diwan (2014), Aulia dkk(2022), Fauziati dkk (2021), Sidharta (2017), Tsikas (2020), Khasanah et al. (2018), Mangoting et al. (2019), Abjadi et.all (2023), Usman et,al(2023), Ndlovu dan Schutte (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi elemen model Slippery Slope, yaitu antara kepercayaan, kekuasaan, serta faktor-faktor lain seperti keadilan dan norma sosial terhadap kepatuhan pajak Metode analisis yang digunakan meliputi *Systematic Literature Review* temua dari berbagai studi yang di-review. Berikut Tabel Ringkasan Penelitian:

Tabel 1. Ringkasan Jurnal yang di Review

| Judul | Penulis | Tahun | Temuan |
|--|---|-------|--|
| Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework | Benny Ramadhan, Ahmad Rodoni | 2021 | Kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak |
| Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan) | Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, Jufrizen | 2021 | Kepercayaan terhadap otoritas pajak adalah determinan utama kepatuhan pajak sukarela. Keadilan, kepercayaan, dan norma sosial berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. |
| Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan | Desy Karlisa Mariganto, Rulinawaty Kasmad, Agus Joko Purwanto | 2023 | Persepsi keadilan, kepercayaan masyarakat, dan kebijakan tarif pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak. |
| Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak | Dwi Ratmo | 2014 | Denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. |
| Attitude Towards Tax Compliance among SMEs in Tanzania | Tumsifu Elly | 2015 | Sikap wajib pajak UMKM beragam tergantung pada kebijakan dan implementasi oleh otoritas pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan sosial. |
| Voluntary versus Enforced Tax Compliance: The Slippery Slope Framework in the Brazilian Context | Fábio Pereira da Silva, Reinaldo Guerreiro, Eduardo Flores | 2019 | Kepercayaan meningkatkan kepatuhan sukarela, sementara kebijakan berbasis pemaksaan menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan. |
| Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Pajak | Firda Ayu Amalia | 2021 | Motivasi pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pembayaran pajak didasarkan pada kekuasaan pemerintah. |

| | | | |
|---|--|------|--|
| Model Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak | Gunawan, Sitti Miska | 2022 | Moral pajak, sosialisasi, dan lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan. |
| Pengujian Extended Slippery Slope Framework Dalam Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen | Nadzirul Haq, Fauzan Misra | 2023 | Kepercayaan implisit lebih tinggi pengaruhnya dibanding kepercayaan berbasis alasan. Kekuasaan legitimasi lebih berpengaruh dibanding kekuasaan koersif. |
| Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model | I Nyoman Darmayasa, Nyoman Sentosa Hardika | 2021 | Implementasi CTAS meningkatkan kekuatan otoritas pajak melalui persepsi kegunaan, mendukung peningkatan penerimaan pajak. |
| Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model | I Nyoman Darmayasa, I Made Marsa Arsana, I Made Agus Putrayasa | 2024 | Rekonstruksi model kepatuhan SSF berdasarkan nilai Pancasila dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan sukarela. |
| Peran Keadilan Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah | Nadia Fajriana, Gugus Irianto, Wuryan Andayani | 2020 | Keadilan prosedural, keadilan distributif, dan kepercayaan kognitif meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan kognitif tidak memoderasi hubungan keadilan dengan kepatuhan. |
| Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME | Nitami Galih Pangesti dkk | 2023 | Kepercayaan dan persepsi risiko mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Keadilan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. |
| A Comparison of Psychological Factors For Tax Compliance: Self Employed Versus Salaried People | Khurana & Diwan | 2014 | Faktor psikologis berbeda antara pekerja mandiri dan karyawan bergaji dalam kepatuhan pajak. |
| Pengaruh Pendidikan, Trust, dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak | Popi Fauziati, Nailal Husna, Helmawati | 2021 | Pendidikan, trust, dan power secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Trust dan power secara parsial berpengaruh. |
| Trust, Power, and Tax Risk into the "Slippery Slope": A Corporate Tax Compliance Model | Sandra Aulia, Haula Rosdiana, Inayati Inayati | 2022 | Risiko pajak mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Kepercayaan dan kekuasaan merupakan faktor penentu kepatuhan pajak. |
| Pengujian Model "Slippery Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak | Iwan Sidharta | 2017 | Kepercayaan dan kekuasaan merupakan faktor pembentuk kepatuhan wajib pajak. |
| Enforce Taxes, but Cautiously: Societal Implications of the Slippery Slope Framework | Stefanos A. Tsikas | 2020 | Kepercayaan tinggi dan peningkatan penegakan pajak berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. Interaksi antara kepercayaan dan penegakan pajak penting. |
| Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope | Uswatun Khasanah, Sutrisno T., Endang Mardiaty | 2018 | Pemeriksaan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Imbalan tidak berpengaruh signifikan. |
| Taxpayer Compliance Model Based on Transparency, Ethics, and Trust | Yenni Mangoting, Henri Tangkelobo, Wihelmina Lely Sin | 2019 | Transparansi dan etika mempengaruhi kepatuhan pajak. Kepercayaan dan etika memoderasi pengaruh transparansi terhadap kepatuhan pajak. |
| Factors Contributing to Tax Compliance among Small and Medium Sized Enterprises: A Case of Selected SMEs in Iringa Municipality | Alnuru Issa Abjadi, Enock J. Wiketye, Hosea Mpogole | 2023 | Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tarif pajak tinggi menghambat kepatuhan pajak. Sanksi pajak tinggi berpengaruh positif. |

| | | | |
|---|--|------|---|
| Determinants of Personal Income Tax Compliance Behaviour in Kaduna State, Nigeria: Slippery Theory Approach | Alhasan Usman | 2023 | Tingkat pendapatan, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan penegakan pajak adalah penentu penting kepatuhan pajak penghasilan pribadi. |
| The Influence of Penalties on the Tax Compliance Behaviour of Small Business Owners | Mphagahlele O. Ndlovu, Daniel P. Schutte | 2023 | Hukuman pajak mendorong pembayaran pajak tepat waktu. Hukuman besar dapat membuat enggan mendaftar. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. |

Dari tabel.1 dapat dilihat beberapa temuan utama terkait model kepatuhan pajak berbasis *Slippery Slope*, yaitu sebagai berikut:

Korelasi Kepercayaan dan Kekuasaan dengan Kepatuhan Pajak

Slippery Slope yang merupakan model dengan mengintegrasikan dua elemen utama dalam mendorong kepatuhan pajak yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas. Dalam model ini, kepercayaan dan kekuasaan berperan sebagai dua faktor yang saling melengkapi dan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Benny & Rodoni (2021) serta Haq & Misra (2023) menegaskan bahwa kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Iklim pajak yang baik dan kekuasaan legitimasi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan kekuasaan koersif. Hal ini sejalan dengan temuan Tsikas (2020) yang menunjukkan interaksi antara kepercayaan dan upaya pencegahan mempengaruhi kepatuhan pajak secara positif. Sidharta (2017) mendukung konsep ini dengan menunjukkan bahwa interaksi yang harmonis antara kepercayaan dan kekuasaan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak. Darmayasa, dkk (2021) merekonstruksi *Slippery Slope* dan diyakini mampu secara dinamis mengubah iklim yang antagonistik menjadi sinergis untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. kepatuhan sukarela.

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam konteks pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak, penelitian oleh Kirchler et al. (2014), Aulia et al. (2022), Dahrani (2021), dan Usman (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi pada otoritas pajak secara positif berkorelasi dengan kepatuhan sukarela wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan yang didasarkan pada keyakinan akan adilnya otoritas pajak dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih baik. Selanjutnya, penelitian oleh Ratmo (2014) mengindikasikan bahwa kepercayaan tersebut dapat bertindak sebagai faktor mediasi antara berbagai aspek keadilan dalam proses perpajakan dengan tingkat kepatuhan pajak. Di samping itu, penelitian oleh Haq dan Misra (2023) serta Fajrina (2020) menyoroti perbedaan jenis kepercayaan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak, di mana kepercayaan implisit dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada kepercayaan berbasis alasan. Temuan Mangoting (2019) menambahkan dimensi transparansi, menunjukkan bahwa kepercayaan dan perilaku etis wajib pajak dapat meningkat seiring dengan tingkat transparansi dalam tata kelola perpajakan dan keuangan pemerintah. Di sisi lain, penelitian oleh Pangesti (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan pada kemampuan deteksi otoritas pajak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyediakan wawasan yang beragam dan mendalam tentang peran penting kepercayaan pada otoritas pajak dalam mendorong kepatuhan pajak.

Studi oleh Mangoting dkk (2019) mengidentifikasi bahwa etika dan kepercayaan mampu mempengaruhi peran transparansi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepercayaan dan perilaku etis wajib pajak akan meningkat seiring dengan kemampuan pemerintah menciptakan transparansi dalam tata kelola sistem perpajakan dan keuangan pemerintah yang

kemudian berdampak pada kepatuhan wajib pajak.. Silva et al. (2019) juga menambahkan bahwa persepsi tentang keadilan dalam sistem perpajakan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Khasanah et al. (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, dan kepercayaan pada otoritas pajak dapat mengurangi pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak.

Dampak Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kekuasaan otoritas pajak, terutama dalam hal penegakan hukum dan sanksi, berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak yang dipaksakan. Benny & Rodoni (2021) menunjukkan bahwa jenis kekuasaan dapat dibedakan antara kekuasaan koersif dan kekuasaan legitimasi. Kekuasaan koersif, yang berfokus pada penegakan hukum dan sanksi, cenderung meningkatkan kepatuhan terpaksa. Di sisi lain, kekuasaan legitimasi, yang berbasis pada kepercayaan dan penghormatan terhadap otoritas, cenderung meningkatkan kepatuhan sukarela. Abjadi (2023) merekomendasikan bahwa kekuasaan legitimasi, yang ditunjukkan melalui pendekatan yang bersahabat dan edukatif oleh otoritas pajak, dapat mendorong kepatuhan sukarela di kalangan UKM. Haq & Misra (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan implisit memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kepercayaan berbasis alasan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Haq & Misra (2023) menemukan bahwa kekuasaan yang efektif, yang mencakup pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dahrani et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan otoritas pajak melalui inspeksi dan audit mampu meningkatkan kepatuhan yang dipaksakan. Ndlovu & Schutte (2023) dalam penelitiannya tentang pengaruh penalti terhadap perilaku kepatuhan pajak di kalangan pemilik usaha kecil menemukan bahwa penerapan penalti yang konsisten dan adil dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kekuasaan penting dalam penegakan kepatuhan, bentuk kekuasaan yang lebih diterima dan dihormati oleh wajib pajak (legitimasi) memiliki dampak yang lebih positif dibandingkan kekuasaan yang bersifat koersif atau menakutkan. Ratmo (2014) menunjukkan bahwa denda dan keadilan prosedural meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Khasanah et al. (2018) menemukan bahwa pemeriksaan pajak dan tindakan penegakan lainnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama jika disertai dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Haq dan Misra (2023) juga menekankan bahwa kekuasaan legitimasi lebih efektif dibandingkan kekuasaan koersif dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian Abjadi (2023) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Faktor Lain yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian model Slippery Slope, faktor-faktor selain kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Persepsi keadilan, seperti yang diamati oleh Mariganto et al. (2023), Ratmo (2014), dan Fajriana dkk (2020), berperan penting dalam menentukan sejauh mana individu atau entitas mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, norma sosial, seperti yang diungkapkan oleh Dahrani dkk(2021) dan Gunawan & Mispa (2022), serta motivasi dan sikap, seperti yang diteliti oleh Amalia (2021) dan Elly (2015), juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Pendidikan dan pengetahuan pajak, sebagaimana ditemukan oleh Fauziati dkk (2021) dan Abjadi et al. (2023), turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Selain itu, risiko pajak dan penalti, seperti yang dipaparkan oleh Aulia dkk (2022), Ndlovu, dan Schutte (2023), serta persepsi risiko, seperti yang diidentifikasi oleh Nitami Pangesti et al. (2023), juga turut berkontribusi.

Pembahasan

Model Slippery Slope mengintegrasikan kepercayaan dan kekuasaan sebagai dua elemen utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak memfasilitasi kepatuhan sukarela, sedangkan kekuasaan otoritas pajak memastikan bahwa ada konsekuensi untuk ketidakpatuhan. Interaksi antara kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Temuan Tsikas (2020) menunjukkan bahwa interaksi Kepercayaan dan pencegahan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara positif. Model Slippery Slope menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan baik melalui peningkatan kekuasaan otoritas (seperti pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat) maupun peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (melalui transparansi, pelayanan yang baik, dan komunikasi yang efektif). Kepercayaan yang tinggi pada otoritas pajak dapat memperkuat kepatuhan pajak, terutama ketika didukung oleh kekuasaan legitimasi yang bersifat edukatif dan berorientasi pada kerjasama dengan wajib pajak. Kepercayaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transparansi dalam tata kelola perpajakan dan perilaku etis wajib pajak.

Dari hasil *review literatur*, tampaknya kepercayaan pada otoritas pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Kirchler et al. (2014), Aulia et al. (2022), dan Dahrani (2021), menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keadilan dan transparansi otoritas pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kekuasaan otoritas pajak juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan yang bersifat legitimasi, seperti pendekatan edukatif dan bersahabat, lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dibandingkan dengan kekuasaan yang bersifat koersif. Otoritas pajak yang menggunakan pendekatan edukatif cenderung meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan fungsi dari pajak. Pendekatan bersahabat dari otoritas pajak dapat menciptakan hubungan yang positif dan saling percaya antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga akan timbul *cooperative compliance*. Pendekatan edukatif dan bersahabat lebih efektif daripada kekuasaan yang bersifat koersif. Meskipun ancaman denda dan sanksi mungkin efektif dalam jangka pendek, namun seringkali tidak berkelanjutan.

Implikasi Praktis

Berdasarkan penelitian yang direview, implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih saran kepada pemerintah atau otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pertama, pentingnya membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak melalui transparansi dalam administrasi pajak, komunikasi yang efektif mengenai kewajiban pajak, dan pelayanan yang baik. Kedua, memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak patuh secara adil dan konsisten, tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan seperti yang dibahas dalam penelitian Elly (2015) dan Ndlovu & Schutte (2023). Ketiga, pemerintah dapat meningkatkan pendekatan edukatif dan bersahabat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, studi-studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara kepercayaan, kekuasaan, dan kepatuhan pajak, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil di Indonesia. Kelima, Wajib pajak badan perlu mengelola risiko pajak dengan baik untuk menghindari konsekuensi pajak yang tidak terduga di masa depan dan untuk menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, seperti yang disarankan oleh Aulia dkk (2022).

Tantangan dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika kepatuhan pajak, tantangan utamanya adalah memahami bagaimana perkembangan teknologi dan inovasi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memupuk rasa saling percaya dan pemahaman yang efektif. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan pajak dengan metode campuran (*mix method*) melalui wawancara atau forum diskusi serta metode eksperimen. Variabel lain yang dapat dieksplorasi adalah dampak penggunaan teknologi seperti aplikasi perpajakan online atau analisis big data dalam memfasilitasi kepatuhan pajak dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggali tingkat pemahaman wajib pajak terkait perpajakan secara kualitatif.

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam studi tentang kerjasama antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam kerangka *cooperative compliance*, dengan penelitian yang dilakukan secara dua arah, baik terhadap wajib pajak maupun otoritas pajak. Penelitian juga perlu memperhatikan peran faktor budaya lokal dalam membentuk persepsi dan kepercayaan terhadap otoritas pajak serta variabel lain seperti risiko pajak.

Peneliti selanjutnya dapat mentegrasikan teori Slippery Slope dengan teori Motivasi (*Self-Determination Theory*) dari Deci dan Ryan. Dengan memenuhi kebutuhan psikologis, otoritas pajak dapat meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Model Slippery Slope mengintegrasikan kepercayaan dan kekuasaan sebagai elemen utama dalam kepatuhan pajak, di mana kepercayaan mendorong kepatuhan sukarela dan kekuasaan memastikan adanya konsekuensi untuk ketidakpatuhan. Terdiri dari 23 jurnal yang direview, menunjukkan bahwa wajib pajak yang percaya pada otoritas pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Kekuasaan otoritas pajak yang bersifat koersif efektif untuk kepatuhan yang dipaksakan, namun kekuasaan legitimasi dan pendekatan edukatif lebih efektif dalam jangka panjang. Selain itu, faktor lain seperti persepsi keadilan, norma sosial, motivasi, dan pendidikan pajak juga penting. Temuan menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan bersahabat dari otoritas pajak, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib pajak, dibandingkan dengan pendekatan koersif yang hanya efektif dalam jangka pendek. Implikasi kebijakan yang diusulkan adalah peningkatan transparansi, pelayanan yang baik, dan komunikasi efektif oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak, sebagaimana disarankan oleh peneliti seperti Silva et al. (2019), Khasanah et al. (2018), dan Fauziati et al. (2021). Sehingga akan terjalin *cooperative compliance tax*.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan metode campuran (*mix method*), termasuk wawancara, forum diskusi, dan eksperimen, untuk mempelajari kepatuhan pajak. Variabel yang dapat dieksplorasi meliputi dampak teknologi seperti aplikasi perpajakan online dan analisis big data, serta pemahaman wajib pajak secara kualitatif. Penelitian juga perlu memperdalam studi tentang kerjasama antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam kerangka *cooperative compliance*, serta mempertimbangkan peran faktor budaya lokal dan risiko pajak. Peneliti dapat merekonstruksi teori Slippery Slope dengan mengintegrasikan Teori Motivasi (*Self-Determination Theory*) dari Deci dan Ryan untuk meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak dan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abjadi, A.I., Wiketye, E., & Mpogole, H. (2023). Factors Contributing to Tax Compliance among Small and Medium Sized Enterprises: A Case of Selected SMEs in Iringa Municipality. *International Journal of Finance and Accounting*.
- Allingham, M.G.; Sandmo, A.; Jackson, B.R.; Milliron, V.C.; Small, O.; Brown, L. Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects. *J. Public Econ.* 1986, 5, 125–165.
- Amalia, F. A. (2021). Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan kepatuhan Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>
- Aulia S, Rosdiana H, Inayati I. Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability*. 2022; 14(22):14670. <https://doi.org/10.3390/su142214670>
- Becker, G.S. Crime and Punishment: An Economic Approach. *J. Political Econ.* 1968, 76, 169–217
- Benny. R., Rodoni.A., (2021) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 2 No. 9, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408>
- Da Silva, F.P., Guerreiro, R. & Flores, E. Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. *Int Rev Econ* 66, 147–180 (2019). <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Elly, T. (2015). Attitude towards Tax Compliance among SMEs in Tanzania. *Operations Research Society of Eastern Africa*, 5(1), 54-75. Retrieved from <https://orseajournal.udsm.ac.tz/index.php/orsea/article/view/34>
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228-244. doi:<http://dx.doi.org/10.33603/jka.v4i2.4039>
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust, dan Power terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46–59. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Gangl, K., Muehlbacher, S., de Groot, M., Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., & Kirchler, E. (2013). “How can I help you?” Perceived service orientation of tax authorities and tax compliance. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 69(4), 487-510.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24-37.
- Haq E., A. N., & Misra, F. (2023). PENGUJIAN EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3914>
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36-45.

- Khasanah, U., T., S., & Mardiaty, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 75-93. doi:<https://doi.org/10.18196/jai.2001109>
- Khurana.P., Diwan. U (2014). A COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL FACTORS FOR TAX COMPLIANCE: SELF-EMPLOYED VERSUS SALARIED PEOPLE. *International Journal of Management and Social Sciences. Vol.2. NO. 3*
- Kirchler, Erich, Christoph Kogler, dan Stephan Muehlbacher. 2014. “Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Deference.” *Current Directions in Psychological Science* 23 (2): 87–92.
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104-118. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/jab.v19i1.399>
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104-118. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/jab.v19i1.399>
- Mariganto, D. K. ., Kasmad , R. ., & Purwanto , A. J. . (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1903-1918. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1494>
- Pangesti, N. G., Bani Alkausar, Prininta Nanda Soemarsono, Hanifiyah Yuliatul Hijriah, & Abdullah, A. (2023). Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 7(2), 185–195. <https://doi.org/10.20473/tijab.v7.i2.2023.50103>
- Ratmono, Dwi. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 18, no. 1, pp. 42-64, doi:10.20885/jaai.vol18.iss1.art4.
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak.
- Torgler, B. Beyond punishment: A tax compliance experiment with taxpayers in Costa Rica. *Rev. De Análisis Económico* 2003, 18, 27–56.
- Tsikak, S.A. Enforce taxes, but cautiously: societal implications of the slippery slope framework. *Eur J Law Econ* 50, 149–170 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10657-020-09660-8>
- Usman, A., Birat, S., & Jibril, B. I. (2023). Determinants of Personal Income Tax Compliance Behaviour in Kaduna State, Nigeria: Slippery Theory Approach A. *Global Journal of Accounting*, 9(1), 18-33. Retrieved from <http://gja.unilag.edu.ng/article/view/1845>